



LAPORAN KEGIATAN BPP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
BULAN JULI TAHUN 2025



TIM PENYUSUN

BP3OKP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Pengarah	:	Hantor Matuan, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Polhukam	:	Fransiscus Elosak, S.H., M.H
Anggota Kelompok Kerja Papua Cerdas	:	Paul Wetipo, S.Pd
Anggota Kelompok Kerja Papua Sehat	:	Gaad Piranid Tabuni, SP., M.M.
Anggota Kelompok Kerja Papua Produktif	:	Yoyo Iwik Sriyoto, S.Sos., M.Si
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Meisly Mariana Kombong, S.AP.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Otniel Elokpere, S.Pd.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Teo Aprianus Dini

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA	1
TIM PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Ringkasan Kelembagaan	5
1.3.1 Definisi	5
1.3.2 Struktur Kelembagaan	6
1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan	6
1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja	7
BAB II PEMBAHASAN	8
2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan	8
2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan.....	17
2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si.....	19
2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Paul Wetipo, S,Pd).....	25
2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Gaad Piranid Tabuni,SP.,M.M).....	28
BAB III PENUTUP	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi khusus dilaksanakan dalam rangka tercapainya kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, penghormatan terhadap Hak Asasi khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Otonomi Khusus di Papua telah memasuki babak baru. Setelah berjalan 20 tahun, Pemerintah Pusat melanjutkan pemberian Otonomi Khusus bagi Papua dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam peraturan tersebut, diamanatkan pada Pasal 68A bahwa perlu dibentuk badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Dalam menjalankan amanat tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua (BPP).

Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan SHEK dalam pelaksanaan Otsus Papua. Badan tersebut diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, serta satu orang Perwakilan OAP dari setiap Provinsi Papua DOB Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu dalam pelaksanaannya, akan dibantu pula oleh Sekretaris Eksekutif di Jakarta dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berlokasi di Papua, Kelompok Kerja, serta Kelompok Ahli. Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat, seperti kompleksitas koordinasi antara lembaga dan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman di antara mereka dalam efektivitas komunikasi.

Arah percepatan pembangunan telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Rencana induk tersebut memuat berbagai target dengan capaian dan dampak yang terukur. Agar pelaksanaan tugas BPP dapat sejalan dengan rencana induk, perlu disusun Rencana Kegiatan dan Program Kerja BPP. Rencana kegiatan dan program kerja ini memuat Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum dan ringkasan kelembagaan, Bab II yang terdiri atas target outcome, rencana kegiatan dan program kerja, serta Bab III Penutup. Rencana kegiatan dan program kerja menjadi acuan bagi Badan Pengarah Papua, khususnya bagi Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas SHEK percepatan Pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

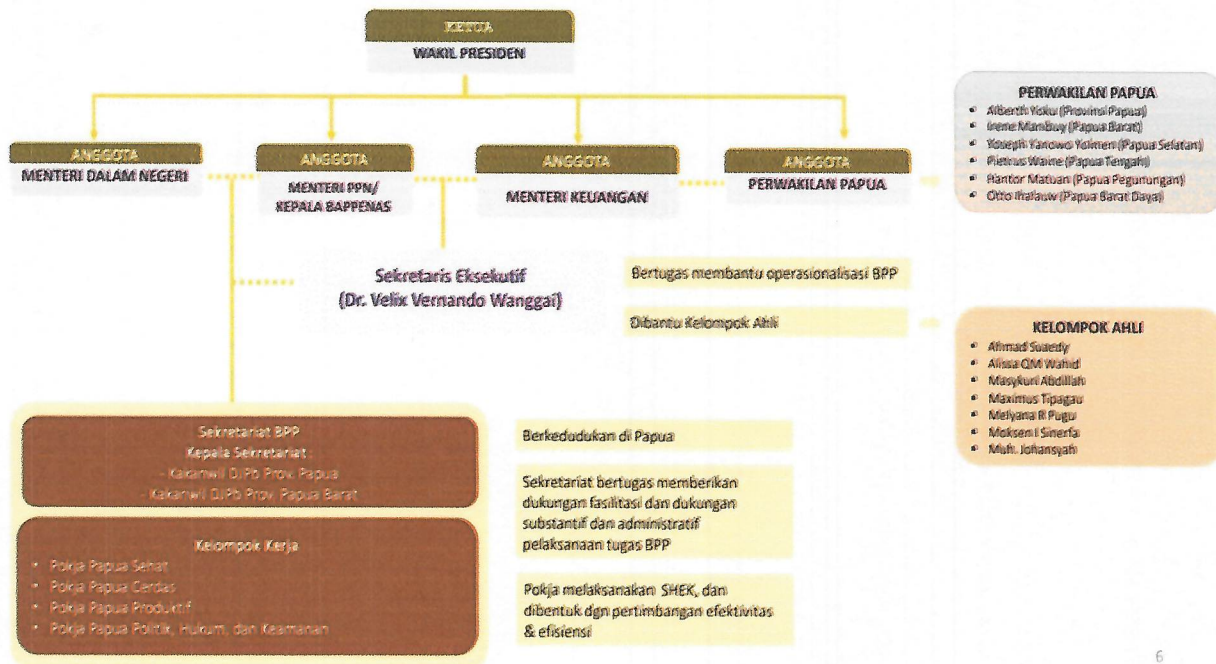
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
7. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua;
8. Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keanggotaan, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Pembidangan Tugas Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
9. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua;
10. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-3/SETBPP/JYP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua.
11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-1/SET/JYP/2025 tentang Penetapan Tim Dukungan Administratif dan Tim Dukungan Substantif Sekretariat Badan Pengarah Papua.

1.3 Ringkasan Kelembagaan

1.3.1 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.3.2 Struktur Kelembagaan



1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk

- Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
- e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja

Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk Kelompok Kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Papua. Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Papua dalam:

- a. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua; dan
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lem.baga dan pemerintah daerah Provinsi Papua berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Kerja menyelenggarakan fungsi:

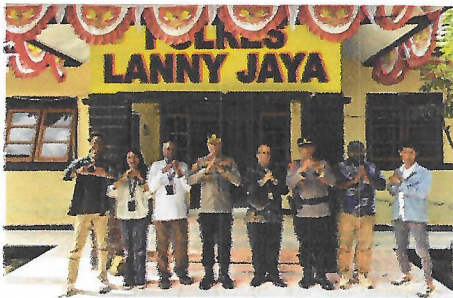
- a. Konsultasi dan kordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. Koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- d. Pengolahan dan pelaporan data serta informasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- e. Membantu Sekretariat Badan Pengarah Papua dalam komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota" dengan masyarakat di Provinsi Papua;
- f. Menyusun laporan kelompok kerja; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan Pengarah Papua.

BAB II PEMBAHASAN

Kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya per Bulan Juli tahun 2025 antara lain:

2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Hantor Matuan, S.IP.

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Kunjungan BP3OKP Papua Pegunungan ke Polres Lanny Jaya: Komitmen Bersama Menjaga Keamanan dan Mendukung Pembangunan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Kamis, 3 Juli 2025, bertempat di Polres Kabupaten Lanny Jaya.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Meninjau situasi keamanan di Kabupaten Lanny Jaya serta memperkuat koordinasi antara BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dan Polres Lanny Jaya dalam mendukung pembangunan daerah.
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP, Pokja Papua Polhukam, Kapolres Lanny Jaya
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi.
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP, Pokja Papua Polhukam
Hasil Kegiatan	:	• Teridentifikasi tantangan keamanan, termasuk insiden penyerangan oleh KKB, konflik politik pasca Pemilu 2024, konflik antar kampung, sengketa wilayah, dan gangguan lalu lintas akibat pemalangan jalan. • Kapolres menyampaikan kebutuhan peningkatan fasilitas Polres Lanny Jaya (ruang kerja, pelayanan, dan asrama anggota) untuk mendapat perhatian pemerintah pusat. • BP3OKP memberikan apresiasi atas kinerja Polres Lanny Jaya dan berkomitmen menyalurkan aspirasi tersebut ke pusat. • Disepakati pentingnya komunikasi dan kerja sama berkelanjutan demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Rapat Internal BP3OKP bersama Pokja.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Juli 2025, bertempat di Ruang Kerja Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Membahas jadwal rencana kunjungan BP3OKP ke MRP, DPRD, dan 8 Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Polhukam dan Pokja Papua Produktif.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP bersama seluruh Pokja BP3OKP.
Hasil Kegiatan	:	BP3OKP akan mulai mengirimkan surat kunjungan ke masing-masing Lembaga dan Pemerintah Daerah yang akan di Kunjungi, dan kunjungan bersama MRP akan dilaksanakan dalam bulan Juli serta dalam sisa waktu 5 bulan BP3OKP akan mengunjungi 8 Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Rapat Koordinasi dan Sosialisasi BP3OKP bersama MRP Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Maret 2025, bertempat di Sekretariat MRP Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Membangun sinergi kelembagaan dan memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua Pegunungan. • Menyampaikan visi, misi, tugas, dan fungsi BP3OKP kepada unsur MRP.

Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP, Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Produktif, Pokja Papua Polhukam, Ketua I MRP, Ketua II MRP, dan anggota MRP.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP bersama seluruh Pokja BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	• BP3OKP memaparkan dasar hukum, struktur kelembagaan, dan peran strategis masing-masing Pokja, beserta program kerja dan rencana tindak lanjut. • MRP menyatakan sepakat bahwa BP3OKP dan MRP memiliki tujuan yang sama untuk mengawal pembangunan demi kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). • Disepakati pentingnya meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarlembaga, termasuk dengan DPRP. • Kesepakatan fokus pada isu strategis: penanganan stunting, penguatan kesehatan, pengawalan program pemerintah pusat, dan kerjasama dalam menjaga keamanan wilayah. • BP3OKP memberikan apresiasi kepada MRP atas perjuangan keterwakilan penuh OAP di DPRP Papua Pegunungan. • Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas lembaga untuk pelaksanaan Otsus yang lebih efektif, partisipatif, dan berkeadilan.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Dalam Rapat Koordinasi Bersama Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 29 Juli 2025, bertempat di Hotel Baliem Pilamo Wamena.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Strategis Nasional di Provinsi Papua Pegunungan, seperti <i>Makan Bergizi Gratis (MBG)</i>, Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan Sekolah Rakyat. • Memastikan keselarasan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • Mendorong pemerintah daerah menyesuaikan RPJMD dengan RPJMN. • Membahas langkah pengendalian inflasi daerah dan upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8% pada tahun 2029.
Peserta Kegiatan	:	Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Wakil Gubernur, Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan perwakilan Kementerian Perimbangan Pemerintahan, Rombongan Inspektorat Jenderal Kemendagri, MRP Provinsi Papua Pegunungan, Bupati dari 8 Kabupaten, dan tamu undangan lainnya.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	:	BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	• Pemda diimbau mendukung penuh pelaksanaan program strategis nasional dan memastikan implementasinya di daerah. • Penegasan bahwa kepala daerah wajib menyesuaikan program dengan kebijakan pusat, dengan sanksi jika tidak mendukung. • Komitmen melakukan reviu dokumen perencanaan daerah untuk menjamin keselarasan RPJMD dan RPJMN. • Penyampaian manfaat sinkronisasi program, termasuk potensi alokasi anggaran dari pusat. • Pembahasan langkah pengendalian inflasi, termasuk kebijakan subsidi transportasi distribusi pangan untuk menekan harga. • Penekanan peran daerah dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 8% pada tahun 2029. • Dialog antara Wamendagri dan para kepala daerah mengenai persoalan strategis di Papua Pegunungan.

Dokumentasi Kegiatan	:	 
----------------------	---	---

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Peluncuran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Di Desa Welesi Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Senin, 21 Juli 2025, bertempat di Distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Menyaksikan dan mengikuti peluncuran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai bagian dari program nasional pemberdayaan ekonomi desa. • Memperkuat kemandirian pangan dan ekonomi masyarakat Papua Pegunungan berbasis koperasi. • Mendukung percepatan legalisasi koperasi di seluruh desa/kelurahan wilayah Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bupati Kabupaten Jayawijaya, Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan delapan kabupaten, Kelompok pertanian, peternakan, UMKM, ekonomi kreatif, BUMD, BUMN, Masyarakat desa dan kelurahan di Papua Pegunungan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP bersama Pokja Papua Sehat.

Hasil Kegiatan	: • Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih resmi dilakukan oleh Presiden RI secara nasional. • Ditetapkan komitmen bersama untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem, khususnya bagi Orang Asli Papua. • Data terkini: dari 2.627 desa/kelurahan di Papua Pegunungan, baru 174 koperasi yang memiliki badan hukum, sisanya dalam proses legalisasi. • Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten berkomitmen mempercepat pembentukan koperasi di seluruh desa/kelurahan. • Presiden menjanjikan dukungan sarana, termasuk 2 unit truk untuk setiap koperasi, guna mempermudah transportasi hasil pertanian. • Program Kopdes Merah Putih menjadi bagian dari Trisula Pengentasan Kemiskinan bersama program Cek Kesehatan Gratis dan Sekolah Rakyat.
Dokumentasi Kegiatan	:  

Kegiatan 6	
Nama Kegiatan	: Audiensi Badan Pengarah Papua (BPP) se Papua Raya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: Dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Juli 2025, bertempat di Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Menyerahkan potret tata kelola dana Otonomi Khusus (Otsus) dari seluruh wilayah Papua kepada KPK RI, sekaligus mendesak perbaikan sistemik, penguatan fungsi pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan Otsus.

Peserta Kegiatan	:	Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dari enam wilayah tanah Papua, Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Unsur pemerintah daerah terkait.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	• BP3OKP memaparkan capaian, tantangan, dan permasalahan pengelolaan Otsus, termasuk keterlambatan syarat salur, lemahnya pengawasan, minimnya pemahaman pemda terhadap perencanaan dan pelaporan, serta indikasi penyelewengan dana. • KPK RI menegaskan perlunya perubahan paradigma pengelolaan Otsus, penguatan pengawasan aset daerah, dan disiplin kerja aparatur. • Paparan potret masing-masing wilayah BP3OKP yang mencakup capaian, kendala, dan rekomendasi perbaikan tata kelola. • Kesepahaman untuk memperkuat koordinasi pusat–daerah, mengatasi ego sektoral, dan mendorong keterlibatan BP3OKP dalam program nasional. • Rekomendasi pembentukan tim IT, pelabelan/tagging dana Otsus, pembuatan LPJ secara bertahap, serta penegakan regulasi terhadap daerah yang mengabaikan fungsi BP3OKP.
Dokumentasi Kegiatan	:	

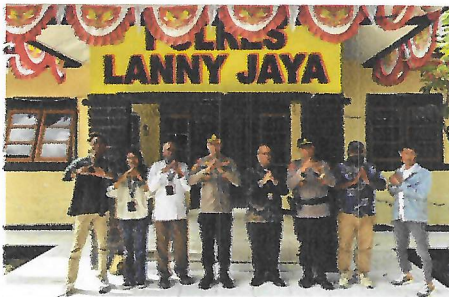
Kegiatan 7		
Nama Kegiatan	:	Konsolidasi Regional Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Tanah Papua Tahun 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 Juli 2025, bertempat di Jayapura.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Membangun keharmonisan program pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah. • Mengimplementasikan rekomendasi Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah.

		• Mempercepat pelaksanaan 8 Program Prioritas Kemendikdasmen, termasuk pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas guru, pembelajaran berbasis teknologi, penguatan karakter, dan revitalisasi bahasa daerah. • Membahas isu-isu strategis pendidikan di Tanah Papua melalui kolaborasi multi pihak.
Peserta Kegiatan	:	• Perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen diwakili Widyaprada Ahli Utama Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah). • Pj. Gubernur Provinsi Papua. • Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP). • Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). • Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Tanah Papua. • UPT Kemendikdasmen di Tanah Papua: BPMP Papua, BPMP Papua Barat, BGTK Papua, BGTK Papua Barat, Balai Bahasa Papua. • Mitra pendidikan: Yayasan Nusantara Sejahtera (YNS), World Vision Indonesia (WVI), UNICEF, Komunitas Kitong Bisa.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	• Tersusunnya rekomendasi percepatan implementasi program prioritas pendidikan di Tanah Papua. • Pembagian pembahasan dalam 8 komisi dengan topik mulai dari revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, SPMB berkeadilan, wajib belajar 13 tahun, pendidikan karakter, tata kelola guru, hingga isu pendidikan kontekstual Papua. • Teridentifikasi kendala di daerah, seperti: 1. Regulasi kewenangan pengelolaan pendidikan antara provinsi dan kabupaten/kota. 2. Pemerataan jumlah, kualitas, dan kesejahteraan guru, termasuk pengelolaan PPPK. 3. Kurikulum khas Papua yang mengadopsi kearifan lokal. 4. Rendahnya kompetensi dasar baca-tulis-hitung siswa Papua. 5. Ketimpangan akses pendidikan bagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah (ATS). • Terbangunnya komitmen sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media, dan mitra untuk mewujudkan pendidikan bermutu di Tanah Papua.

Dokumentasi Kegiatan	:	 The image shows a group of approximately 15 people, including men and women, standing in two rows in front of a large blue banner. The banner has white text that reads 'KONSOLIDASI REGIONAL' in large letters, followed by 'PENGUKUHAN DASAR DAN MENINGKATKAN SETIAWAH PAPUA TAHUN 2020' in smaller letters. Below this, there is a line of smaller text: 'Kegiatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura'. The people are dressed in a mix of casual and semi-formal attire. The background is a plain wall, and the foreground shows some greenery and flowers.
-----------------------------	----------	--

2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Fransiscus Elosak, S.H.,M.H

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Kunjungan BP3OKP Papua Pegunungan ke Polres Lanny Jaya: Komitmen Bersama Menjaga Keamanan dan Mendukung Pembangunan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Kamis, 3 Juli 2025, bertempat di Polres Kabupaten Lanny Jaya.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Meninjau situasi keamanan di Kabupaten Lanny Jaya serta memperkuat koordinasi antara BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dan Polres Lanny Jaya dalam mendukung pembangunan daerah.
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP, Pokja Papua Polhukam, Kapolres Lanny Jaya
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi.
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Polhukam
Hasil Kegiatan	:	• Teridentifikasi tantangan keamanan, termasuk insiden penyerangan oleh KKB, konflik politik pasca Pemilu 2024, konflik antar kampung, sengketa wilayah, dan gangguan lalu lintas akibat pemalangan jalan. • Kapolres menyampaikan kebutuhan peningkatan fasilitas Polres Lanny Jaya (ruang kerja, pelayanan, dan asrama anggota) untuk mendapat perhatian pemerintah pusat. • BP3OKP memberikan apresiasi atas kinerja Polres Lanny Jaya dan berkomitmen menyalurkan aspirasi tersebut ke pusat. • Disepakati pentingnya komunikasi dan kerja sama berkelanjutan demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Pokja Papua Polhukam BP3OKP mengunjungi Kapolsek Wamena Kota dalam rangka menanggapi situasi keamanan di Kabupaten Jayawijaya usai peristiwa penikaman di Hom-Hom
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Senin, 28 Juli 2025, bertempat di Kantor Kapolsek Wamena Kota, Hom-Hom, Kabupaten Jayawijaya,
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Menanggapi situasi keamanan pasca kejadian penikaman di Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya, sekaligus mencari informasi dan memahami akar permasalahan pembunuhan almarhum Gerson Kristian Jikwa.
Peserta Kegiatan	:	Anggota Pokja Papua Polhukam, Kapolsek Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Evaluasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	:	
Hasil Kegiatan	:	• Kapolsek melaporkan situasi keamanan di Distrik Hubikiak pasca kejadian penikaman saat ini kondusif. • Pelaku penikaman (Demianus Pabika, Edison Walalua, Paskalis Sorabut, dan Frans Pabika) telah diamankan dan ditahan di sel Polres Jayawijaya. • Penyebab kejadian diidentifikasi berawal dari permasalahan konsumsi minuman beralkohol (miras) yang melibatkan korban dan istri salah satu pelaku tanpa sepengetahuan suaminya. • Proses penyelesaian menunggu laporan dari pihak keluarga korban untuk penentuan waktu mediasi. • Fransiskus A. Elosak memberikan apresiasi kepada Kapolsek atas langkah pengamanan, dan menyarankan pentingnya membangun komunikasi persuasif dengan kedua belah pihak guna penyelesaian masalah secara damai.
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan
Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan dan Pembekalan Pasca Pelantikan Koni Kabupaten Mamberamo tengah
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025, bertempat di Hotel Grand Sartika
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mengawali berdirinya cabang Olahraga untuk menjaring atlet yang berprestasi di kabupaten Mamberamo Tengah
Peserta Kegiatan	:	Kadispora, Ketua DPR, Ketua Cabor, Ketua Dan Pengurus Koni Kabupaten Mamberamo tengah, Kahar Dan Waketum Koni Provinsi Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Harmonisasi
Misi/Keterangan	:	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	Sinkronisasi dan Koordinasi bagi pemerintah, pengurus koni dan ketua cabor untuk bisa membentuk dan menghidupkan cabor-cabor Kabupaten agar bisa ada kegiatan olahraga dan bisa menciptakan atlet prestasi yang berkualitas.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Menghadiri Undangan Konsultasi Publik 1 - KLHS Dan RPJMD Tahun 2025 - 2029 Provinsi Papua Pegunungan oleh Dinas ATR, Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 11 Juli 2025, bertempat di Gedung Aithousha Wamena.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Keselarasan isu strategis dengan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan.

		• Perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis Provinsi Papua Pegunungan. • Status pembangunan berkelanjutan Provinsi Papua Pegunungan saat ini • Kerangka pikiran KLHS RPJMD Provinsi Papua Pegunungan
Peserta Kegiatan	:	Para OPD, Dosen Akademisi Uncen, Kepala Pu, LSM, Toga, Organisasi, Paguyuban.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Harmonisasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	• Koordinasi dan Evaluasi isu strategis mengenai pemerataan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, mitigasi bencana yang terintegrasi dan sinergi adat untuk pembangunan Provinsi Papua Pegunungan. • Evaluasi hasil kajian - kajian lingkungan hidup strategis yang mulai dari kajian ekonomi, sosial dan lingkungan baik tingkat RT/RW, RPJP, RPJM DAN KRP.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan Seluruh Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif Seluruh Indonesia
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 18 Juli 2025, Bertempat di Jakarta.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Merencanakan dan Koordinasi seluruh ketua untuk persiapan kongres Gekrafs pemilihan ketua umum periode 2025 - 2030 • Menyusun dan berkolaborasi program kerja kegiatan Ekraf seluruh Indonesia
Peserta Kegiatan	:	Ketua Umum dan Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif 38 Provinsi seluruh Indonesia.

Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi dan Evaluasi.
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	- Berkoordinasi seluruh ketua Gekraf untuk menjalankan dan menyusun program Ekonomi Kreatif sesuai Misi Kemenekraf RI. - Mensinkronkan dan koordinasi pemilihan ketum gekrafs sesuai AD dan ART Gekrafs
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Rapat rencana pembentukan Koperasi Merah Putih Provinsi Papua Pegunungan oleh Deputi KEMENDES – SPI Jakarta
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 14 Juli 2025, bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	- Rencana pembentukan program Koperasi Desa Merah Putih di 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan - Pembentukan secara kolektif Akte pendirian pembentukan KMP oleh para notaris - Program kerja KMP di masing-masing desa seluruh 8 Kabupaten
Peserta Kegiatan	:	Deputi Kemendes, Baperinda Provinsi Papua, Sekda Prov. Papua Pegunungan, 8 Bupati di Provinsi Papua Pegunungan, Anggota BP3OKP, Kadis Perindagkop 8 Kabupaten, Para OPD Provinsi Papua Pegunungan Dan Para Notaris
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Harmonisasi dan Sinkronisasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	Koordinasi, sinkronisasi seluruh 8 kabupaten Provinsi Papua Pegunungan untuk menjalankan Program Ekonomi

		Pemerintah yaitu pembentukan koperasi Desa Merah Putih • Berkoordinasi karena wilayah 8 Kabupaten yang jauh, terisolir dan tidak ada notaris, maka pembuatan akte pendirian Koperasi Desa Merah Putih dibuat secara kolektif dengan menambah jumlah notaris dari luar. • Mengsinkronkan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih harus dijalankan setiap 1 desa untuk membantu dan meningkatkan perekonomian desa dan menunjang program Makan Bergizi Gratis.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Undangan Konggres 1 Gekrafs (Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional) Di Jakarta.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 18 s/d 20 Juli 2025, bertempat di Dome Senayan Park, Stadion Base Ball GBK.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Konggres 1 pemilihan pengurus Gekrafs periode 2025 - 2030 dan penyusunan program • MOU Gekrafs dan Men Ekraf • Festival pelaku Ekrafs dan panggung musik
Peserta Kegiatan	:	Ketua 38 DPW Dan Pengurus, Ketua Umum Gekrafs, Men Ekraf, Menkumham, Menbud, Men Burnn, Wakil Ketua DPR RI.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Harmonisasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	• Sinkronisasi dan Koordinasi agar pemilihan ketum sesuai AD dan ART Gekrafs, Sedangkan penyusunan program kerja diikuti dan disetujui oleh para ketua dan perwakilan peserta pengurus gekrafs.

		• Koordinasi dan Harmonisasi MOU Gekrafs dan Men Ekraf untuk mensukseskan 8 misi Men Ekraf dan Program Strategis lainnya. • Koordinasi dan Kolaborasi panitia Gekrafs melalui suara fest dengan menampilkan para pelaku Ekraf dari berbagai daerah untuk menampilkan hasil produknya dan juga menampilkan para artis papan atas untuk tampil di panggung suara fest yang sudah disiapkan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 6		
Nama Kegiatan	:	Undangan Kejuaraan Nasional Tae Kwon Do - Kapolri Cup 2025.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 25 s.d. 27 Juli 2025, bertempat di Gor jati diri, Semarang, Jawa Tengah
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Program Kejuaraan Nasional tahunan yang diselenggarakan oleh Kepolisian RI • Bentuk Kerjasama Polri dan PB Taekwondo untuk mencari bibit atlet prestasi baik dari internal kepolisian maupun luar kepolisian.
Peserta Kegiatan	:	Kapolri, Kapolda Jateng, Ketua Umum 38 Provinsi, para atlet junior dan senior, manager, dan pelatih.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Harmonisasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	• Evaluasi dan Sinkronisasi dalam Penyelenggaraan tetap Kejurnas Taekwondo yang selalu diikuti dan disupport dari 38 Provinsi Polda Seluruh Indonesia. • Mengutamakan Koordinasi Dan Kolaborasi Penjaringan Atlet Prestasi Nasional Dan Internasional Baik Junior Maupun Senior Sangat Terbuka Lebar Untuk Masa Depan Para Atlet Seluruh Indonesia.

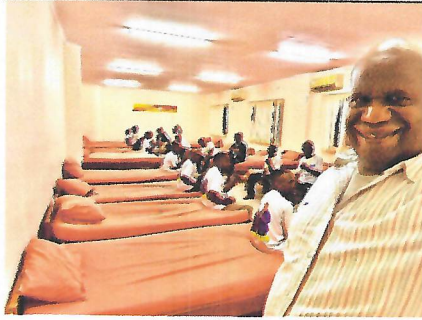
Dokumentasi
Kegiatan

:



2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan
Koordinator: Paul Wetipo, S,Pd)

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Kunjungan Pokja Papua Cerdas bersama Anak-anak asli Wamena yang disekolahkan oleh Pemda Jayawijaya di Semarang.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 24 Juli 2025, bertempat di Kota Semarang.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melaksanakan program pemulihan dan rehabilitasi anak-anak jalanan Kabupaten Jayawijaya untuk memberikan pendidikan, pembinaan, serta pengembangan keterampilan yang mendukung masa depan mereka, sekaligus mempersiapkan peserta untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal sesuai kemampuan dan usia.
Peserta Kegiatan	:	• 50 anak jalanan asal Kabupaten Jayawijaya. • Yayasan pengelola yang kompeten di bidang rehabilitasi sosial dan pendidikan anak. • Pihak SMK di Semarang sebagai mitra pelatihan keterampilan. • Pokja Papua Cerdas BP3OKP • Bupati Kabupaten Jayawijaya
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas.
Hasil Kegiatan	:	• Seluruh peserta menjalani pendidikan berpola asrama yang terstruktur dan terawasi. • Peserta mendapatkan program rehabilitasi sosial untuk pemulihan perilaku dan mental. • Diselenggarakan berbagai pelatihan pengembangan keterampilan bekerja sama dengan SMK di Semarang. • Setelah 1 tahun program rehabilitasi, peserta akan diseleksi berdasarkan usia dan keterampilan untuk diarahkan ke pendidikan formal yang sesuai.

Dokumentasi Kegiatan	:	 
----------------------	---	---

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Kunjungan ke Program Papua Cerdas bersama Dinas P&k Kabupaten Jayawijaya dan Pemerintah Provinsi mengenai Sekolah Berkualitas Standar Nasional Plus di Kota Wamena.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 28 Juli 2025, bertempat di Kota Wamena.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Menyediakan fasilitas pendidikan berkualitas tinggi dengan kurikulum nasional plus di wilayah Papua Pegunungan. • Memperluas akses pendidikan dasar yang bermutu bagi anak-anak di Kota Wamena. • Mempersiapkan generasi muda Papua agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Peserta Kegiatan	:	• Pokja Papua Cerdas, Guru dan murid Sekolah Papua Harapan Wamena.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas.
Hasil Kegiatan	:	• Sekolah telah memulai proses belajar-mengajar dengan penerapan kurikulum nasional plus dan fasilitas pendukung yang memadai. • Anak-anak usia dini dan siswa SD di Kota Wamena kini memiliki akses ke pendidikan berkualitas tinggi tanpa harus pergi ke luar daerah.

		Program ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, orang tua siswa, dan tokoh pendidikan setempat.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan
Koordinator: Gaad Piranid Tabuni, SP., M.M)

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Rapat Koordiansi BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan POKJA Papua Sehat bersama Direktur RSUD Wamena Kabupaten Jayawijaya membahas tentang Keadaan RSUD Wamena.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Senin, 15 Juli 2025, bertempat di Ruang Pertemuan RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Menjalin koordinasi dan mediasi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) antara BP3OKP Pokja Papua Sehat dan RSUD Wamena. • Menginventarisasi data kesehatan Orang Asli Papua (OAP) dan kebutuhan fasilitas kesehatan di RSUD Wamena. • Membahas permasalahan pelayanan kesehatan dan kendala operasional RSUD yang berdampak pada pelayanan masyarakat.
Peserta Kegiatan	:	• Direktur RSUD Wamena beserta jajaran dokter dan perawat. • Perwakilan BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan: Pokja Papua Sehat (Gaad Piranid Tabuni, SP., M.M.). • Staf dan tenaga kesehatan RSUD Wamena (termasuk Dr. Charles C.R., Sp.Og. dan Dr. Ronny Oagay).
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	• Permasalahan yang Ditemukan Adalah beban pasien rujukan dari 7 kabupaten menyebabkan stok obat dan fasilitas menipis, sementara anggaran Otsus tidak proporsional. • RSUD Wamena akan menyiapkan dan menyerahkan data yang diminta BP3OKP, meliputi: 1. Data OAP versi RSUD Wamena. 2. Data pasien OAP dan dari 7 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan. 3. Data ibu hamil, kematian ibu/anak, penyakit menonjol, HIV/AIDS, TBC. 4. Data kebutuhan RSUD (obat, alat, fasilitas). 5. Data tenaga ahli (dokter umum, spesialis, perawat). 6. Klarifikasi penggunaan dana Otsus untuk kesehatan OAP.

Dokumentasi Kegiatan	:	 
----------------------	---	---

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Launching Program Noken Masa Depan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada Jumat, 25 Juli 2025, bertempat di Gereja GSJA Filadelfia Wamena.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Melestarikan noken sebagai warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO. • Mengembangkan keterampilan kerajinan tangan masyarakat, khususnya mama-mama Papua. • Mendorong pemanfaatan noken sebagai sumber penghasilan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. • Membangun kesadaran generasi muda agar ikut menjaga budaya lokal.
Peserta Kegiatan	:	• Pokja Papua Sehat BP3OKP • Perwakilan dari tiga denominasi gereja di Provinsi Papua Pegunungan. • Mama-mama pengrajin noken dari berbagai kabupaten. • Tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. • Perwakilan pemerintah daerah dan dinas terkait. • Masyarakat umum yang peduli terhadap pelestarian budaya.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat

Hasil Kegiatan	:	• Terlaksananya acara launching dengan partisipasi antusias dari berbagai lapisan masyarakat. • Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan noken. • Terbentuknya komitmen bersama tiga denominasi gereja untuk mendampingi mama-mama pengrajin dalam produksi dan pemasaran noken. • Terbukanya peluang pemasaran noken ke pasar lokal maupun luar daerah.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

BAB III PENUTUP

Penerapan Otonomi Khusus di Papua telah memasuki tahap baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan didukung oleh pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) melalui Perpres Nomor 121 Tahun 2022. Tugas utama BPP mencakup sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan di Papua. Selain berfokus pada pembangunan fisik dan kesejahteraan, BPP juga berkomitmen memastikan partisipasi aktif masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dan menjembatani kebutuhan mereka dengan kebijakan pemerintah pusat. Di bawah rencana induk yang terukur melalui Perpres Nomor 24 Tahun 2023, BPP berperan penting dalam mengarahkan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi implementasi Otsus Papua.

Dengan adanya BPP yang memiliki wewenang dan struktur yang jelas, diharapkan percepatan pembangunan di Papua dapat terlaksana sesuai dengan rencana induk yang telah disusun hingga tahun 2041. Kerjasama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat Papua sangat diperlukan agar pelaksanaan Otsus dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, serta kesetaraan bagi seluruh masyarakat Papua. Evaluasi berkala dan pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus ini untuk mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, damai, dan produktif.

Kegiatan yang di lakukan oleh BP3OKP dalam hal ini anggota dan juga masing-masing pokja berhubungan dengan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi terutama dalam era kepemimpinan baru Gubernur dan Bupati diharapkan BP3OKP dapat mengambil peran penting dalam pembangunan di Papua Pegunungan.

**Wamena, 8 Agustus 2025
BP3OKP
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**



HANTOR MATUAN, S.IP.